

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM**

#### **A. SURAT KABAR TRIBUN JOGJA**

##### **1. Sejarah Tribun Jogja**

PT. Media Tribun Jogja merupakan salah satu anak perusahaan dari *Group of Regional News Papper Kompas Gramedia (KG)*. Perusahaan Kompas Gramedia (KG) didirikan oleh Petrus Kanisius Ojong dan Jacob Oetama pada tanggal 20 Juni 1965. Tribun Jogja merupakan salah satu anggota dari Tribun Network. Tribun Network sendiri memiliki surat kabar yang tersebar luas di 18 propinsi di Indonesia, yaitu di Sumatra terdapat Serambi Indonesia (Aceh), Sriwijaya Pos (Palembang), Bangka Pos (Bangka Belitung), Tribun Batam (Batam), Tribun Pekanbaru (Riau), Tribun Jambi (Jambi), dan Tribun Lampung (Lampung). Di Pulau Jawa terdapat Tribun Jabar (Bandung), Harian Surya (Surabaya) dan Tribun Jogja (Yogyakarta). Di Kalimantan terdapat Bnajarmasin Post (Kalimantan Selatan). Tribun Kaltim (Kalimantan Timur) dan Tribun Pontianak (Kalimantan Barat). Di Sulawesi yaitu Tribun Manado (Sulawesi Utara), dan yang terakhir adalah Nusa Tenggara Timur yaitu Pos Kupang (Kupang).

PT. Media Tribun Jogja adalah koran ke 16 dari *Group of Regional News Papper Kompas Gramedia*. Koran ini hadir menyapa warga

Yogyakarta dan sekitarnya pertama kali pada tanggal 11 april 2011, dengan tampilan 20 halaman, yang terbagi dari dua sesi yang masing-masing sesi terdapat dua web. Sebelum terbit dalam tampilan media cetak, pada tahun 2010 telah hadir versi online yakni Tribun Jogja Online. Bagi Tribun Jogja masyarakat ditempatkan sebagai orang spesial di panggung kehormatan. Hal ini dikarenakan nama Tribun yang diartikan panggung kehormatan dan menjadi tempat untuk memberitahu, memperlihatkan dan menunjukkan hal-hal spesial yang dilakukan oleh insan tersebut. Oleh karena itu nama Tribun Jogja dipakai karena koran ini ingin menempatkan pembaca sebagai orang yang terhormat dan menyajikan berita dengan lengkap. Untuk memperluas bidang usaha, Tribun Jogja saat ini juga menyelenggarakan dan melaksanakan jasa *event organizer* dalam rangka menyebar luaskan informasi dan promosi suatu bidang atau jasa yang berskala regional, nasional maupun internasional.

Pembagian isi berita di Tribun Jogja terdiri dari berita lokal sebanyak 75% dan 25% untuk berita nasional serta internasional. Tribun Jogja menjual koran dengan harga yang sangat terjangkau, yaitu dengan harga seribu rupiah. Hal ini dimaksudkan agar tribun jogja dapat dibaca oleh seluruh kalangan masyarakat serta bisa memenuhi kebutuhan masyarakat dari semua kalangan. Jika dibandingkan dengan koran-koran lainnya, Tribun Jogja termasuk koran yang murah tapi Tribun Jogja selalu berusaha untuk tidak memberikan berita-berita yang murahan. Salah satu caranya

yaitu, memiliki karyawan yang rata-rata berumur 30 tahun sehingga bisa selalu membuat inovasi-inovasi baru.

## 2. Visi dan Misi Tribun Jogja

Setiap perusahaan memiliki visi dan misi yang menjadi dasar dari pekerjaan mereka. Dengan visi menjadi kelompok usaha penerbitan surat kabar, media online dan percetakan daerah terbesar dan tersebar di DIY dan Jateng, serta misi untuk menciptakan informasi yang terpercaya untuk memberikan spirit baru dan mendorong terciptanya demokratisasi di daerah dengan menjalankan bisnis yang beretika, efisien dan menguntungkan perusahaan haruslah berguna bagi perusahaan dan juga masyarakat, Tribun Jogja ingin memajukan daerah Yogyakarta.

Selain memiliki visi dan misi, Tribun Jogja memiliki *Tag line* yaitu, “SPIRIT BARU DIY-JATENG” yang bertujuan mendampingi dan mengkritik pemerintah untuk mendorong terciptanya demokratisasi di wilayah DIY dan Jateng.

## 3. Logo Tribun Jogja



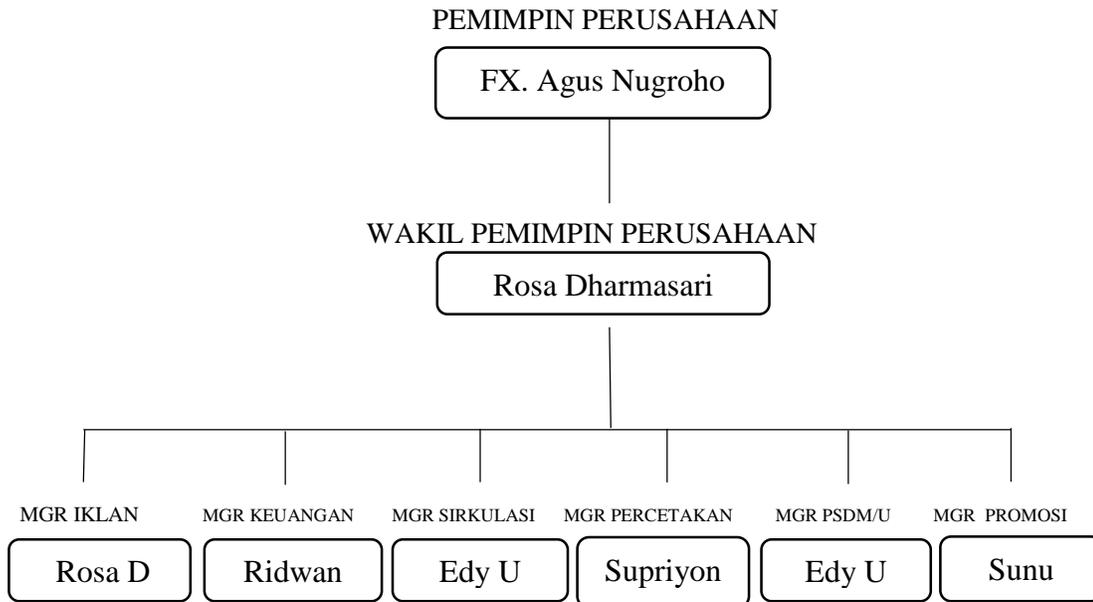
Gambar 2.1 Logo Tribun Jogja

#### **4. Alamat Tribun Jogja**

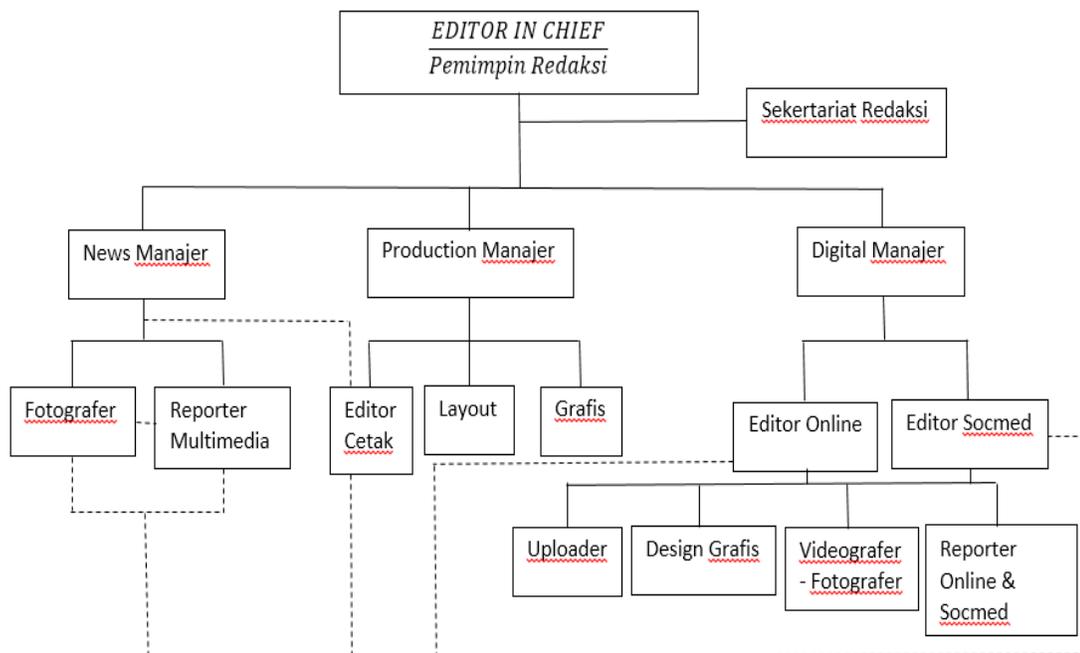
Alamat Redaksi dan Bisnis : Jl. Jendral Sudirman No. 52  
Yogyakarta,  
Telepon : (0274) 557687  
Email : [tribunjogja@gmail.com](mailto:tribunjogja@gmail.com)  
Website : [www.tribunjogja.com](http://www.tribunjogja.com)  
Alamat Percetakan : Jl. Ringroad Barat Km 8, Trihanggo,  
Sleman, Yogyakarta

#### **5. Struktur Organisasi PT. Media Tribun Jogja**

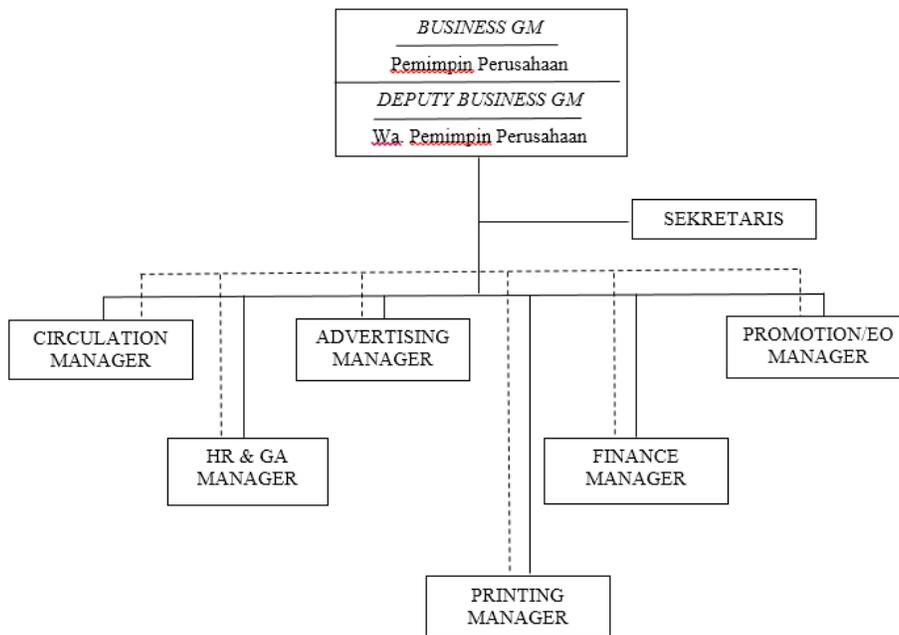
Secara umum PT. Media Tribun Jogja memiliki enam divisi pokok untuk menjalankan sistem operasional sehari-hari, yaitu ada pemimpin perusahaan, wakil pemimpin perusahaan, manajer keuangan, manajer sirkulasi, manajer percetakan, manajer PSDM/U, manajer promosi. Divisi tersebut di bagi dalam dua divisi utama, yaitu Redaksi dan Bisnis. Perusahaan Tribun memiliki pimpinan umum yaitu Pak Sentry Janto yang membawahi pimpinan perusahaan dan pimpinan redaksi. Seperti yang dijelaskan dalam bagan berikut :



Bagan 2.1 Struktur Perusahaan Tribun Jogja



Bagan 2.2 Struktur Organisasi Redaksi Tribun Jogja



Bagan 2.3 Struktur Organisasi Bisnis Tribun Jogja

## 6. Kategori Rubrik Tribun Jogja

Dalam setiap surat kabar pasti memiliki sajian berita yang berbeda-beda, salah satunya penyajian berita dalam Surat Kabar Harian Tribun Jogja. Tribun Jogja menyajikan teknik penyajian rubrik berita yang bermacam-macam. Berikut adalah rubrik- rubrik dalam Tribun Jogja:

- a. Halaman Muka Tribun Jogja (Headline) : Halaman ini berisi dengan berita-berita yang sedang terjadi atau hangat diperbincangkan baik secara nasional, lokal hingga internasional. Disajikan dengan gambar dan desain cover yang menarik hati pembaca.

- b. Rubrik Internasional : Rubrik ini berisi berita-berita yang terjadi di berbagai belahan dunia termasuk berita-berita tentang dalam negeri di mata dunia.
- c. Tribun Bizz : Rubrik ini menyajikan berita-berita terkait bisnis yang sedang berkembang atau teknologi terbaru baik dunia otomotif hingga elektronik.
- d. Tribun Shopping : Rubrik Shopping menyajikan artikel yang ada kaitannya dengan dunia belanja, *fashion* hingga tips gaya berbusana yang sedang *trend*.
- e. Rubrik Hotline Public Services : Sesuai dengan namanya, rubrik ini berisi pertanyaan ataupun keluhan dari masyarakat terkait dengan pelayanan publik baik pemerintahan ataupun swasta.
- f. Rubrik Magelang Square dan Tribun Jateng : Dalam rubrik ini ditampilkan berita-berita dari wilayah Magelang dan Jawa Tengah yang dikupas secara mendalam.
- g. Rubrik Seleb Lifestyle : Rubrik ini merupakan kumpulan berita-berita mengenai dunia selebritis, terkait kehidupan personalnya, baik selebritis nasional hingga internasional.
- h. Rubrik I-tribunners : Dalam rubrik ini ditampilkan komentar-komentar pembaca dari dunia maya mengenai sebuah berita atau isu yang sedang hangat diperbincangkan, seperti facebook dan twitter. Dalam Rubrik ini juga Kolom Citizen Journalism dimuat.

- i. Rubrik Malioboro Blitz : Rubrik ini berisi berita dari wilayah Yogyakarta baik pendidikan, politik, kriminal, maupun budaya, serta berita-berita seputar kawasan malioboro yang dianggap sebagai jantung kota Yogyakarta.
- j. Rubrik Superball dan Soccerland : Rubrik ini berisi berita-berita mengenai seputar dunia sepakbola dan mengupas beberapa tokoh olahraga, baik dari internasional, nasional hingga regional.
- k. Rubrik Smart Women : Rubrik ini berisi tentang dunia karir atau kehidupan sosok wanita inspiratif yang bertujuan untuk menginspirasi dan menggerakkan wanita untuk maju dalam karir atau kesehariannya.
- l. Rubrik Culinary Guide : Rubrik ini berisi menu makanan atau minuman andalan dari sebuah kafe, resto yang ditujukan kepada pembaca Tribun Jogja.
- m. Rubrik Art and Culture : Rubrik ini berisi terkait berita-berita dalam dunia kesenian atau kebudayaan yang ada dengan ulasan yang ringan dan santai.
- n. Rubrik Community Life : Rubrik ini berkaitan tentang komunitas-komunitas yang ada dan berkembang di Jogja.
- o. Rubrik Music Zone : Rubrik ini berisi mengenai berita-berita seputar perkembangan dunia musik lokal, nasional hingga internasional.
- p. Rubrik Kine Tribun : Rubrik ini berisi mengenai berita-berita seputar perkembangan dunia film lokal, nasional hingga internasional

q. Rubrik Home : Rubrik Home ini menampilkan artikel-artikel yang menyangkut hunian atau hotel hingga desain interior di dalamnya.

## **B. Aktivitas film di Yogyakarta**

Khrisna Sen dalam buku *Sinema Indonesia Membingkai Orde Baru* (2013) menyatakan bahwa dalam dunia industri film, masa-masa awal kemerdekaan ditandai oleh antusiasme yang tinggi terhadap pengalaman revolusi yang baru saja berlalu tentang film Indonesia itu sendiri. Pada tahun 1950 berdiri perusahaan pertama milik pribumi Indonesia. Usmar Ismail dan banyak pengagumnya beranggapan bahwa film perfini (Perusahaan Film Nasional) merupakan perusahaan film Indonesia pertama yang sesungguhnya. Tetapi banyak penulis yang beranggapan bahwa hiburan mataram *Stichinh* didirikan di Yogyakarta pada tahun 1948, merupakan perusahaan film pribumi pertama. Perusahaan ini dipimpin oleh seorang mantan pejabat Jepang, Hinatsu Heitaro, yang menjadi warga Negara Indonesia dan memiliki nama baru Dr. Hayung. Mulai pada tahun itu industri film semakin berkembang. Film di Yogyakarta bisa kita pahami dengan menelusuri satu istilah yang umum dipakai oleh para pembuat film di tahun 2000-an, yakni film independen atau film indie. Meski ada pihak yang menaruh harapan besar dan menyebut film independen sebagai jagat tersendiri (Novita, 2004:24). Film independen diharapkan bisa menjadi satu batu penjuruk bagi pembangunan sistem film yang mandiri, yaitu

terdiri dari sekolah, pembuatan, pemutaran, dan kritik film yang berbeda dengan film pasaran (*mainstream*) (Suwanto dkk, 2015:9). Film independen ini menggambarkan bahwa pembuatan film di Yogyakarta ini tidak terkait dengan industri film yang berpusat di Jakarta. Mulai dari filmmakernya bukan dari orang-orang yang bersekolah film di Jakarta dan alat yang digunakan juga didapatkan dari tempat sekitarnya. Film independen ini tidak di putar di bioskop, melainkan pemutaran film independen ini ialah diranah festival.

Kemunculan pembuatan film di Yogyakarta didukung dengan adanya suatu komunitas film. Komunitas film terlahir paska 1998 dan menjadi “muara apresiasi dan kreativitas film di berbagai daerah, sehingga melahirkan ruang-ruang diskusi, *workshop*, festival dan penciptaan beragam film” (Nugroho dan Suwanto, 2013:361). Komunitas film inilah yang menciptakan unsur-unsur pembuatan film, mulai dari mencari dana, pelatihan keterampilan pembuat film, pemutaran untuk khalayak, hingga media kritik dan penilaian (Suwanto dkk, 2015:11). Beberapa komunitas yang menyelenggarakan program pelatihan, pemutaran, dan apresiasi adalah komunitas kine klub yang berbasis kampus seperti Universitas Gadjah Mada (UGM), Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), dan Universitas Islam Negeri Yogyakarta (UIN).

Selain komunitas film, faktor lain yang turut berperan penting dalam mendukung film independen Yogyakarta adalah festival film. Festival film inilah yang menjadi salah satu peluang pendanaan dan pembuatan film, karena di dalam festival ini para pembuat film dapat bertemu dengan calon pembeli film, pendanaan film, dan para pekerja film yang bisa bekerjasama di kemudian hari (Nugroho dan Suwanto, 2013:394). Dengan adanya festival ini membuat banyak media memerhatikan sinema Indonesia dan menjadi satu-satunya kesempatan ketika hampir semua bioskop ternama di kota tempat festival itu diselenggarakan mempertunjukan lebih banyak film Indonesia ketimbang film China, India, dan Amerika (Sen, 2013:93). Beberapa aktivitas *event* film yang telah diselenggarakan di Yogyakarta, salah satunya yaitu penganugrahan penghargaan FFI (Festival Film Indonesia) ke-31 dilaksanakan di Benteng Vrendenburg, bioskop FKY (Festival Kesenian Yogyakarta) 2017, JAFF-NETPAC, Festival Film Dokumenter, KDM (Klub DIY Menonton). Pembuat film di Yogyakarta telah mencatatkan nama mereka melalui karya-karya program kompetisi, contohnya yaitu Ismail Basbeth yang tercatat dalam sirkuit internasional (Internasional Documentary Film Festival Amsterdam 2013 dan Internasional Film Festival Rotterdam 2015).

Beberapa ciri pembuatan film di Yogyakarta sangat erat sekali hubungannya dengan komunitas film, festival film, dan dengan sistem pendanaan dan perekrutan pekerja film yang berkembang. Yogyakarta

memiliki banyak lembaga pendidikan tinggi yang memberi kesempatan para mahasiswa belajar menggunakan berbagai alat rekam gambar dan suara, penataan set, busana, rias, hingga pengolahan animasi ditahap paska produksi. Mahasiswa baik yang bergabung dalam komunitas film ataupun tidak, membutuhkan kesempatan bekerja dalam pembuatan film untuk meningkatkan kemampuan mereka. Terciptalah hubungan saling membutuhkan antara para pembuat film dan mahasiswa yang mencari kesempatan untuk berlatih (Suwanto, Firly Annisa dkk, 2015:13).

Tidak hanya festival-festival saja yang berada di Yogyakarta. Tempat pemutaran film komersial dan tempat pemutaran film alternative juga sudah banyak tersebar di Yogyakarta. Kurang lebih terdapat 4 bioskop yang sudah tersebar di Yogyakarta, yaitu *Studio 21*, *Empire XXI*, *CGV Blitz*, *Cinemax*. Semua bioskop tersebut terletak didalam pusat pembelajaran atau Mall kecuali Empire XXI. Selain bioskop komersial terdapat pula bioskop alternatif (*arthouse*) seperti gedung Societeit di kompleks Taman Budaya Yogyakarta, Lembaga Indonesia Perancis yang sering memutar film-film Perancis (Aryanto, 2015:10).

### **C. Jurnalisme Film**

Pada saat itu banyak media cetak seperti majalah kebudayaan IV edisi Januari-Februari 1953 dan peneliti seperti Bachtiar Siagan, Ictisar yang menuliskan tentang sejarah perfilman di Indonesia. Pada tahun 1900 gambar bergerak, produksi revolusi teknologi Barat, tiba di Indonesia. Paruh pertama abad 20 merupakan masa perubahan politik yang cepat, menyaksikan Indonesia bergerak dari Kolonialisme. Keberadaan sinema 50 tahun pertama di Indonesia dalam konteks transformasi politik, yang menandai beberapa perkembangan mendasar seperti dominasi etnis Cina, kehadiran film Amerika dan sensor Negara yang menjadi dan bertahan sebagai ciri penentu industry film Indonesia (Sen, 2013:26).

Dalam dua dasawarsa pertama 1900-an film Amerika dan Eriopa menyebar di kota-kota Jawa, terutama di Jakarta (Batavia). Mengenai bioskop pada awal abad ini telah dijelaskan oleh Abeyesekere (1987) pada pertengahan 1920-an ketika film pertama dibuat di Indonesia, telah berdiri 13 bioskop permanen di Jakarta. Tetapi jumlah ini tidak benar-benar mencerminkan tingkat penyebaran film yang sebenarnya karena ada banyak pertunjukan film di luar ruangan, ditenda-tenda non permanen seperti sirkus oleh penjajah film keliling. Hingga awal 1920-an kehadiran film Amerika menimbulkan keprihatinan dikalangan penjajah Belanda. Pada tahun 1926 didirikan komisi Film Hindia

Belanda (Dutch Indies Film Commission) di bawah Departemen Dalam Negeri (Departement of internal affair) untuk menyensor semua film yang masuk ke Indonesia.

Penguasa kolonial menghawatirkan dampak film terhadap pribumi tak berpendidikan. Pada November 1925 *Inter-Ocean*, majalah Hindia Timur Belanda yang masih tersebar meliputi Malaya dan Australia, diterbitkan di Jakarta, menurunkan artikel "*Films In the Orient*" yang mengutip kasus-kasus di Cina, Malaysia, dan India untuk menunjukkan akibat buruk dari beberapa film Amerika. Di tahun berikutnya satu artikel di *The Times* (London), ditulis oleh seorang wartawan yang pernah melakukan perjalanan ke Hindia Belanda dan India Inggris, menarik perhatian majalah film Belanda bernama *Filmland*. Artikel *The Times* menyesalkan "akibat film terhadap harga diri bangsa Eropa di Timur Jauh". Artikel itu mengatakan bahwa penyebaran rumah gambar di negeri-negeri tropis terpencil terjadi secara luar biasa pada tahun-tahun belakangan, dan saat ini jarang ditemui sebuah kota dengan beberapa ribu penduduk yang tidak menyombongkan istana gambar mereka. Akibat menonton film, sekarang sangat banyak masyarakat kulit hitam, coklat, kuning melihat kehidupan orang Eropa sesungguhnya, dan terutama sisi yang paling berkembang adalah kejahatan dan keburukan yang tidak mereka ketahui sampai film Amerika menunjukkan gambaran salah tersebut pada mereka. Artikel ini menjelaskan bahwa meskipun "Bangsa Timur" yang terpelajar dapat

memahami dan telah mengikuti sikap barat, kaum tidak terdidik yang paling tertarik melihat dan terpengaruh oleh film.

Artikel di *Filmland* pada bulan Desember 1926 berjudul “*The Danger From Films in The Colonial Area*”(Bahaya Film di Daerah Jajahan) mengutip tulisan panjang dan artikel di *Times* untuk menunjukkan bahwa:

“Oleh orang-orang Malaysia, Jawa, atau bahkan Indiadan Cina yang lugu, adegan-adegan kejahatan dan keburukan (orang Barat) yang tertayang di layar dianggap sebagai gambaran sesungguhnya dari kehidupan sehari-hari orang kulit putih di Negara mereka. Gambaran adegan cinta... memberi kesan buruk pada mereka tentang moralitas laki-laki kulit putih dan lebih buruk lagi, perempuan kulit putih.”

Artikel tersebut melaporkan bahwa *Cinematographic Conference* (Konferensi Sinematografi) di Paris “membahas bahaya politik dan moral beberapa film di Negara-negara jajahan”. Peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah kolonial pada tahun 1940, yang merinci struktur dan kekuasaan Komisi Film, tetapi menjadi patokan mekanisme sensor melintasi banyak pergantian pemerintah, bahkan setelah kemerdekaan Indonesia (Sen, 2013:28).

Koneksi etnis Cina dalam membuat film di Indonesia, pertengahan tahun 1920-an film-film Cina tiba di Indonesia. Lembaran iklan pada waktu itu menunjukkan bahwa bioskop awal dimiliki oleh orang-orang Cina. Pada tahun 1910 kawasan Cina seperti Glodok, Senen, Pasar Baru dan daerah Pecinan seperti Tanah Abang, Mangga Besar, Kramat dan Pancoran telah memiliki

bioskop. Said dalam Sen Krishna (2013:29) pada tahun 1927 satu Koran Bandung menyatakan bahwa 85 persen bioskop di Hindia Timur Belanda adalah milik orang-orang Cina. Dalam satu dasawarsa orang-orang Cina di Indonesia telah mengimpor film dari Cina sembari memproduksi memproduksi film sendiri di Indonesia. Cina memproduksi film pertama pada tahun 1926 di Bandung oleh 2 orang Eropa. Film etnis Cina Indonesia pertama dibuat oleh Wong Bersaudara, yang bermigrasi dari Shanghai ke Bandung pada tahun 1928 dan memproduksi film di tahun yang sama. Film yang diproduksi yaitu berjudul Si Conat, film ini bercerita mengenai penjahat Indonesia dan pahlawan Cina, yang disebut-sebut sebagai cerita pilihan penyokong dana baru Wong Bersaudara, Jo Eng Sek, seorang peranakan. Si Conat menjadi film Indonesia pertama yang berlatarbelakang Jakarta dan film pertama yang dibuat di Jakarta. Cerita Si Conat versi terbitan pertama ditulis dalam Pramudya Ananta Toer, Tempo Doeloe, Si Conat merupakan cerita lenong bentuk drama yang bisa dikaitkan dengan masyarakat Betawi (penduduk asli Jakarta). Laporan wartawan pada masa itu dalam Panorama 20 Mei 1930, menuliskan berita tentang kesuksesan film Si Conat disebabkan cerita itu populer di masyarakat dan aksi perkelahian yang tak kalah dibandingkan dengan model perkelahian film koboi atau *Wild West* (Sen, 2013:29-30).

Sementara orang Cina menguasai hampir semua produksi film Indonesia sampai dengan kedatangan Jepang pada tahun 1942. Perusahaan produksi film

milik pemerintahan belanda, *Algemeen Nederlandsch-Indisch Film* (ANIF), didirikan pada tahun 1930-an. ANIF penting dalam sejarah produksi film Indonesia karena 3 alasan. Pertama, perusahaan ini memproduksi satu film musik romatis yang sangat laris dan merupakan film pertama dengan pemain pribumi serta didasarkan pada cerita dan skenario yang ditulis oleh pribumi Indonesia. Kedua, ANIF memproduksi film propaganda pertama pemerintahan Belanda. Ketiga, pada tahun 1950 ANIF kemudian berubah menjadi Perusahaan Film Negara (PFN), unit produksi film milik pemerintah Indonesia merdeka.

ANIF memproduksi film propaganda Indonesia pertama yaitu, Tanah Sebrang. Disutradarai oleh pembuat film dokumenter Belanda Mannus Franken. Film ini dibuat untuk Panitia Pusat Pemindahan dan Pendudukan Pribumi (*Central Comitte For Emigration and Colonisation For Natives*) dengan dana dan dukungan dari berbagai departemen pemerintahan termasuk Kepolisian, Jawatan Perkeretaapian, dan Balai Pustaka (penerbitan milik pemerintah). Gamelan (orkestra tradisional Jawa) dalam film ini merupakan sumbangan dari sultan Yogyakarta dan Bupati Malang.

Film kedua ANIF yang berjudul Terang Bulan, dibuat untuk meraih popularitas. Film Terang Bulan merupakan film Indonesia bersuara yang pertama. Film ini merupakan film fiksi terakhir ANIF sampai setelah perang

dan beberapa pengamat melihatnya sebagai pelopor model film-film Indonesia yang kemudian populer (Sen, 2013:31-32).

Aiko Kurosawa, *propaganda media on java under the japanes 1942-45* dalam buku Krishna Sen (2013:33 ) menjelaskan dalam waktu seminggu setelah Belanda menyerah pada 8 Maret 1942, jepang menduduki studio ANIF. *Star news* edisi 5-6 September 1954 yang dituliskan Ismail dalam Krishna Sen (2013:33) jepang memiliki pengetahuan tentang teknik film dan organisasi produksi yang lebih baik dibandingkan produser Cina di Indonesia. Lebih penting dari itu, tindakan orang Jepang menggunakan film sebagai alat propaganda mengajari orang Indonesia cara memakai film sebagai alat perjuangan mereka. Pemahaman baru ini diterapkan pada masa-masa setelah Jepang menyerah dan deklarasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Pekerja film Indonesia mengambil alih peralatan Jepang dan mulai membuat dokumentasi peristiwa bersejarah (Sen, 2013:33). Dalam buku Krishna Sen yang berjudul *Sinema Indonesia membingkai Orde Baru* (2013: 33-34) Siagan mengatakan pekerja film Indonesia akhirnya mulai menghargai makna film sebagai alat perjuangan politik.

Dalam dunia industri film, masa-masa awal kemerdekaan ditandai oleh antusiasme yang tinggi terhadap pengalaman revolusi yang baru saja berlalu dan tentang film Indonesia tersebut. Mannus Franken mengamati pada tahun

1950, setelah perang dunia permintaan film fiksi Indonesia masih lebih besar dari pada sebelumnya disebabkan oleh rasa nasionalisme yang berkembang (Sen, 2013:36).

Dalam buku Krishna Sen (2013:37) Charles menjelaskan bahwa kemunculan definisi bangsa Indonesia turut mempengaruhi film, sebagian disebut oleh Copple, bangsa ini terdiri dari “bermacam-macam kelompok etnis Indonesia asli” meminggirkan Cina sebagai “orang asing”. Nasionalisme ekonomi merupakan “cita-cita tentang suatu kelompok ekonomi yang dikendalikan oleh rakyat Indonesia asli”.

Pada tahun awal kemerdekaan Republik Indonesia ada dua hal lain yang terkait dengan nasionalisme dan kemerdekaan. Pertama adalah persoalan impor film Amerika. Hal kedua adalah sensor (Sen, 2013:37-38). Pada tahun 1948 banyak penulisan yang beranggapan perusahaan film pribumi pertama yaitu Hiburan Mataram *Stichnh*, perusahaan ini dipimpin oleh mantan pejabat Jepang Hinatsu Heitaro yang menjadi warga Negara Indonesia dan memiliki nama baru Dr. Huyung. Perusahaan selanjutnya yaitu perfini (Perusahaan Film Nasional) didirikan pada tahun 1950. Perusahaan pribumi yang ketiga yaitu Persari didirikan oleh Jamaluddin Malik, pengusaha Sumatra, dengan cepat persari menjadi salah satu produser terbesar.

Produser-produser pribumi tersebut merupakan fenomena baru dan menarik jika dilihat berdasarkan konteks waktunya. Sesungguhnya perubahan dalam industri tidak semendasar penjelasan diatas, Jamaluddin Malik bekerja sama dengan berbagai kepentingan bisnis Cina, Indonesia juga asing. Hiburan Mataram dipimpin oleh orang Jepang. Di PFN masih banyak orang Belanda yang bekerja dan memberikan pengaruh yang besar pada semua produksinya. Pembuatan film oleh Jepang sangat meningkatkan peranan pribumi dalam dunia perfilman. Tetapi seperti sebelumnya, perusahaan pribumi tersebut tidak berpengaruh besar dalam perimbangan kendali keuangan industri film. Pada tahun 1956 telah jelas bahwa pengusaha pribumi tidak berhasil menembus dominasi ekonomi etnis Cina (Sen, 2013:39).

Produksi film pertama Perusahaan Film Nasional yaitu, Darah dan Doa oleh Usmar Ismail. Film tersebut bertujuan untuk menjadi dokumen sejarah yang merekam aktivitas Divisi Siliwangi memberantas pemberontak Madiun pada Oktober 1948. Akibat film itu menyentuh banyak hal yang peka. Semua sumber mengatakan bahwa film itu disensor habis tetapi tidak seorang pun menyebutkan dengan rinci bagian mana saja yang dibuang (Sen, 2013:40-41).

Dalam majalah kebudayaan edisi 4 dituliskan, pengalaman Usmar dengan sensor sama sekali tidak istimewa. Pembatasan sensor secara formal dan informal cukup sering terjadi pada awal 1950-an. Armijin Pane secara rinci

menggambarkan sejauh mana *Antara Bumi dan Langit* dipotong Panitia Pusat Sensor Film pada tahun 195. Film ini berkisah tentang persoalan yang peka, yakni kewarganegaraan peranakan Belanda dan Indo di Indonesia. Sebelum film itu selesai, foto publikasi yang memperlihatkan Frieda pemeran utama mencium teman lelakinya yang telah lama menghilang memicu protes sekelompok masyarakat Islam. Setelah selesai film tersebut masih harus diubah berdasarkan rekomendasi sensor, hingga Pane sebagai penulis naskah merasa wajib menarik namanya dari susunan kerabat kerja. Revisi ini membuat film Frieda tidak lebih dari suatu kisa cinta biasa.

Ketika persoalan sensor tersebut dibahas dalam kongres kebudayaan Kedua tahun 1952 tidak seorang pun yang berpendapat bahwa sensor haruslah dihentikan. Dalam majalah Kebudayaan edisi khusus tentang kongres Kebudayaan Kedua di Bandung, palindih mengusulkan bahwa bentuk sensor yang paling dapat diterima adalah “sensor negatif” yang berarti “sensor hanya boleh melarang film atau sebagian dari film itu yang berbahaya bagi masyarakat dan tidak mempunyai hak untuk menentukan apakah film itu baik atau buruk sebagai film”. Ia mengatakan bahwa pekerjaan “melindungi nilai budaya” haruslah diserahkan kepada masyarakat, yang dapat menolak penonton film yang tidak mereka setuju.

Dalam tulisannya di tahun 1970 Usmar Ismail menjuluki awal tahun 1960-an sebagai “Jaman Kegelapan Sejarah film Nasional” yang diwarnai pertikaian antara kekuatan yang dipimpin oleh LEKRA /PKI melawan kekuatan demokrasi di dunia perfilman. Pada awal tahun 1960-an dominasi keuangan bangsa asing terhadap industri film berakhir, setidaknya untuk beberapa waktu. dalam kondisi ekonomi dan politik baru setelah 1965-1966 keluarnya perusahaan besar Amerika membuka jalan perusahaan Indonesia untuk menguasai sektor impor film yang gemuk. Pada tahun 1966 kebijakan anti film Amerika dibalik. Pada tahun 1967 hampir 400 film Amerika Serikat diimpor ke Indonesia. Film Hollywood berkuasa tidak hanya dipasar Indonesia, tetapi juga dalam sistem teks yang menjadi model bagi generasi pembuat film Indonesia berikutnya.

Ketika kekacauan 1965-1966 mereda, transformasi paling langsung yang terjadi pada sinema Indonesia adalah restrukturisasi lembaga-lembaga. Adapun lembaga-lembaga tersebut yaitu, perusahaan produksi, organisasi profesi masyarakat perfilman, sekolah film, dan festival film. Lembaga-lembaga tersebut menentukan apakah itu sinema Indonesia dan siapakah yang dapat menjadi pembuat film (Sen, 2013:87-88).

FFI (Festival Film Indonesia), menjadi acara tahunan sejak tahun 1973. Festival tersebut merupakan satu-satunya peristiwa publikasi terbesar sinema

Indonesia. Ia membuat banyak media memerhatikan sinema Indonesia dan menjadi satu-satunya kesempatan hampir semua bioskop ternama di kota festival tersebut diselenggarakan lebih banyak memutar film Indonesia ketimbang film Cina, India, dan Amerika. Sinema Indonesia benar-benar menggemparkan ketika festival diselenggarakan di provinsi (Sen, 2013:93).

Seperti yang dituliskan pada makalah Jakarta Press Club 29 April 1982, Piala Citra, penghargaan di Indonesia yang serupa dengan Oscar diberikan untuk 12 kategori film, selain beberapa penghargaan yang kurang penting. Meskipun angka penjualan tiket di kota-kota besar cukup jelas mengidentifikasi bahwa Citra tidak membuat suatu film populer dikalangan penonton. Siring perjalanan waktu memenangi piala Citra menjadi tujuan penting para sutradara, aktor, dan orang lain yang bekerja di Industri film, terutama sejak akhir tahun 1970-an ketika film-film Indonesia mulai mendapat nama di percaturan film Internasional. Seperti halnya film yang menjadi *box office*, rumus suatu film yang memenangi Citra akan segera diikuti oleh film lain (Sen, 2013:94).